

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK JAWA TIMUR.

1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a) Tujuan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan, terhadap wawasan kebangsaan bagi aparatur dan masyarakat serta pengamalan dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya bangsa .

b) Sasaran

Masyarakat Jawa Timur dan aparatur

c) Tolok Ukur dan Target Kinerja

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan sebesar Rp 1.260.000.000,00 dengan realisasi Rp. 1.241.283.995,00 (98,51%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan

- Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program Bakesbangpol Prov.Jatim dengan Bakesbangpol dan Linmas Kab/Kota di Jawa Timur dengan peserta sebanyak 76 orang pejabat eselon II dan III;
- Meningkatnya pemahaman dalam Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah dari perwakilan tokoh-tokoh masyarakat suku dan etnis dengan peserta sebanyak 130 orang perwakilan;
- Kesadaran berbangsa dan bernegara semakin meningkat di kalangan elemen masyarakat (organisasi kepemudaan, mahasiswa,) dengan peserta sebanyak 520 orang.

- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga Negara dalam berbangsa dan bernegara dengan peserta 260 orang dari elemen masyarakat.

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Adanya beberapa Kab/Kota yang kelembagaan Kesbangpolnya tidak berbentuk Badan sehingga menyulitkan koordinasi dan sinkronisasi Program /Kegiatan yang di harapkan sama dan berkesinambungan.
- Belum terbentuknya lembaga Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) pada sebagian Kab/Kota di Jawa Timur karena maslah anggaran dan urgensi kebelakang pada masing-masing daerah;
- Fasilitasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa dan wasbang masih bersifat parsial karena belum terkoordinasi dengan satker yang lain.

Upaya Pemecahan Permasalahan

- Mengadakan rapat koordinasi dalam rangka penguatan kelembagaan dan sinkronisasi penyusunan Program/kegiatan.
- Adanya fasilitasi dan koordinasi dengan Kemendagri penyusunan lembaga Kesatuan Bangsa dengan Kab/Kota khususnya yang terkait dengan kesamaan persepsi terhadap Undang-undang No. 32/2004, PP 41/2007 dan PP No.38/2007 dengan Perda Pemerintah Daerah mulai dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota di Jawa Timur;
- Adanya rakor evaluasi secara empirik dan yuridis tentang eksistensinya dan secara kelembagaan dengan FORKOMKON yang telah ada sebelumnya;

- Aktualisasi Wasbang dapat ditingkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja lain baik di Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dengan Kab/Kota sehingga dapat dicapai hasil yang lebih efektif.

2) Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Azasi Manusia

a) Tujuan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan hak azasi Manusia

b) Sasaran

Aparat dan masyarakat, Ormas/LSM

c) Tolok Ukur dan Target Kinerja

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Azasi Manusia sebesar Rp 560.000.000,00 dengan realisasi Rp. 555.186.305 (99,14%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan

- Wawasan semakin tajam dan kesadaran hukum bagi masyarakat semakin melek hukum sebanyak 215 orang dari elemen masyarakat/guru
- Pemahaman dan kesadaran aparat pemerintah dan masyarakat mengenai pentingnya penghormatan HAM semakin meningkat sebanyak 65 orang

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Masih rapuhnya institusi-institusi demokrasi, lemahnya penegakan supremasi hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang

Good Governance dan Hak Asasi Manusia serta kurangnya perhatian terhadap kelompok masyarakat rentan ;

- Masih rendahnya tingkat koordinasi dan konsultasi antar berbagai pihak terkait, serta belum maksimalnya implementasi Hak Asasi Manusia.

Upaya Pemecahan Permasalahan

- Diharapkan para pemangku kewajiban lebih berperan dan membantu mengembangkan peningkatan wawasan sadar hukum dan HAM kepada masyarakat secara menyeluruh, serta mampu menciptakan harmonisasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam suatu pengharapan artikulasi metode pengembangan HAM dalam masyarakat, seirama dengan budaya/kultur masyarakat yang mampu berjalan dengan demokratis ;
- Meningkatkan perkembangan kepribadian dan wawasan serta kesadaran akan harga diri seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengembangan serta memperoleh kecakapan dan keterampilan yang dapat menunjang pekerjaan positif di masa yang akan datang ;
- Hak dasar setiap manusia diharapkan dapat dipenuhi oleh pemerintah dengan jalan meningkatkan pelayanan publik secara maksimal, sehingga masyarakat semakin lebih sadar akan hak dan kewajibannya sebagai pelaku sosial dalam masyarakat.

3) Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi

a) Tujuan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan system politik dalam rangka kualitas kehidupan sosial politik yang demokratis

b) Sasaran

Parpol, elemen masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, Ormas/LSM

c) Tolok Ukur dan Target Kinerja

Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi sebesar Rp 2.800.000.000,00 dengan realisasi Rp. 2.760.120.395,00 (98,58%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan

- Terlaksananya penerbitan SK PAW kepada Anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota se Jawa Timur dan Parpol yang memperoleh kursi di DPR Provinsi Jawa Timur dan terealisasinya bantuan parpol
- Terjalannya komunikasi antar fungsionaris parpol/ormas/LSM dengan pemerintah Provinsi Jatim sebanyak 300 orang.
- Meningkatnya harmonisasi Sosial Politik Masyarakat bagi Supra dan Infra Struktur Politik sebanyak 300 orang.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat berpolitik dalam pemilu pada sebanyak 100 orang.
- Meningkatnya pemahaman LSM/Ormas dan Elemen Masyarakat dalam pembangunan politik di Jatim sebanyak 200 orang.
- Meningkatnya komunikasi lintas Parpol di Jatim sebanyak 700 orang

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya**Permasalahan**

- Ada sebagian ormas/LSM yang diundang tidak hadir dikarenakan ormas tersebut telah pindah alamat dan tidak memberitahukan keberadaannya ke Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.

- Belum melakukan her regerestrasi ulang sehingga perubahan kepengurusan belum dilaporkan ke Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.

Upaya Pemecahan Permasalahan

- Dilakukan identifikasi dan inventarisasi data terhadap keberadaan Ormas/LSM
- Dalam pelasnanan kegiatan pembinaan terhadap Ormas/LSM yang pindah alamat agar segera memberitahukan keberadaan alamat barunya kepada Pemerintah Provinsi (Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur)

4) Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

a) Tujuan

Program ini bertujuan untuk memantau kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing yang ada di Jawa Timur, menciptakan efektifitas jaringan informasi konflik, meningkatkan peran Kominda dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

b) Sasaran

Aparat Kabupaten/Kota se Jawa Timur

c) Tolok Ukur dan Target Kinerja

Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebesar Rp 2.060.000.000,00 dengan realisasi Rp. 2.035.447.060,00 (98,81%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran (matrik 11 kolom).

Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan

- Terpantaunya keberadaan orang asing di Jawa Timur dengan peserta 38 Kab/Kota se Jawa Timur sebanyak 76 orang

- Antisipasi apabila akan terjadi konflik , dengan rapat koordinasi anggota Tim sebanyak 16 orang (anggota Tim).
- Meningkatnya peran dan efektifitas Kominda dalam penanganan konflik di Jawa Timur
- Meningkatnya kepekaan terhadap permasalahan yang akan terjadi di masyarakat.

d) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

Kondisi masyarakat saat ini cenderung kritis dan emosional (irrasional)

Upaya Pemecahan Permasalahan

Meningkatkan penggalangan masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama

5) Program Perbaikan Proses Politik

a) Tujuan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendidikan politik masyarakat

b) Sasaran

Aparatur dan masyarakat/LSM

c) Tolok Ukur dan Target Kinerja

Program Perbaikan Proses Politik sebesar Rp 3.380.000.000,00 dengan realisasi Rp. 3.346.724.780,00 (99,02%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada lampiran (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan

- Meningkatkan kesadaran masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam rangka PemiluKada dengan peserta sebanyak 65 orang
- Meningkatnya kepekaan aparat terkait dalam menyikapi masalah-masalah sosial di masyarakat sebanyak 400 orang
- Tersusunnya buku data evaluasi tentang proses politik yang beretika politik bagi aparaturnya dan masyarakat sebanyak 64 orang.

- Meningkatnya pemahaman aparatur dan elemen masyarakat terhadap budaya politik yang demokratis dan beretika sebanyak 80 orang
- Meningkatnya masyarakat dalam rangka Pengembangan Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan dari aparatur dan elemen masyarakat dengan peserta sebanyak 1.600 orang

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

Kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dan serta pemahaman dalam proses politik masih rendah.

Upaya Pemecahan Permasalahan

Diadakan sosialisasi tentang budaya politik yang demokratis, santun dan beretika.

2. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

a) Tujuan

Terciptannya keamanan tempat-tempat penting dan asset Pemprov. Jatim

b) Sasaran

Terjaganya keamanan tempat-tempat penting dan asset pemprov. Jatim
(Kediaman Gubernur Jatim, Kediaman Wakil Gubernur Jatim, Kantor Gubernur Prov. Jatim, Gedung Negara Grahadi, Kediaman Gubernur Jl. Imam Bonjol dan aset-aset milik Pemprov. Jatim)

c) Tolok Ukur dan Target Kinerja

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan sebesar Rp. 1.871.200.000,00 dengan realisasi Rp. 1.845.330.162,00 (98,62%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Program/kegiatan (Terlampir)

- Terwujudnya penjagaan tempat-tempat penting dan asset milik Pemprov Jatim pada Satker di lingkungan Pemprov Jatim
- Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan wawasan anggota, 50 orang
- Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan, demo-demo massa ke Kantor Gubernur, Gedung Negara Grahadi dan Asset Milik Pem Prov Jatim
- Terbentuknya Sumber Daya Aparatur yang Profesional, kompetitif dan peka terhadap setiap perkembangan dan dinamika yang ada ditengah masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan Trantibum dan Penegakan Peraturan Daerah

- Meningkatnya hubungan kerja, koordinasi antar lembaga dan menumbuhkan kembangkan jiwa korsa Satuan Polisi Pamong Praja di Jawa Timur
- Penyelenggaraan kamtrantibmas dalam rangka Pemilu Kepala Daerah mulai tahap persiapan, pelaksanaan, pelantikan dan pasca
- Meningkatkan kesadaran masyarakat, bahwa ketentraman dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama sebanyak 100 orang
- Menanamkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas
- Membentuk anggota Linmas yang tanggap, trampil dan trengginas dalam melaksanakan tugasnya.

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Masih banyaknya aset-aset milik Pemprov. Jatim yang dipergunakan oleh pihak-pihak lain;
- Minimnya sarana dan prasarana serta mobilitas pengamanan dan pengawalan pejabat VVIP;
- masih terdapat unjuk rasa yang bersifat anarkis
- belum semua anggota Satpol PP memiliki ketrampilan teknis;
- Rendahnya kompetensi anggota satlinmas dalam penanganan bencana dan Pam Swakarsa.

Upaya Pemecahan Masalah

- Peningkatan patroli wilayah
- Peningkatan ketrampilan serta sarana dan prasarana dalam pengamanan pengawalan pejabat VVIP dan penanganan unjuk rasa
- Diperlukan anggota Satpol yang sigap, tanggap dan responsip
- Pelatihan dan Bimtek terhadap anggota Satlinmas dalam penanganan bencana dan tanggap bencana

2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

a) Tujuan

Terlaksananya operasional patroli wilayah terpadu dengan instansi terkait baik secara insidentil maupun berkala

b) Sasaran

- Patroli wilayah daerah rawan pada Kab/ Kota Se Jatim
- meminimalisir bentuk ancaman dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- terwujudnya roda pemerintahan yang aman, tertib dan teratur

c) Tolok Ukur dan Target Kinerja

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal sebesar Rp. 1.463.000.000,00 dengan realisasi Rp. 1.419.551.450,00 (97,03%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Program/kegiatan (Terlampir)

- Tersusunnya jadwal Patroli Wilayah dan koordinasi Ke Kab/Kota se Jatim
- Terwujudnya aparaturnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional, kompetitif dan peka terhadap setiap perkembangan dan dinamika yang ada ditengah masyarakat dan lingkungan kerjanya
- Pemahaman prosedur pemberkasan dalam proses penyidikan
- Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan untuk meningkatkan kemampuan dan performance Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- Tersusunnya jadwal operasi penertiban terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda
- Terpenuhi Sarana dan Prasarana Operasional Satpol PP Prov. Jatim

- Terbentuknya kesamaan pola pikir dan pola tindak antara anggota Satpol PP dengan POLRI dalam melaksanakan tugas mewujudkan ketertiban, ketentraman dan keamanan di Jawa Timur
- Meningkatnya kerjasama yang sinergi antara anggota Satpol PP dengan POLRI dalam penyelenggaraan Kamtrantibum guna menciptakan situasi tertib, tenteram dan aman di Jawa Timur.

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahanya

Permasalahan

- Masih terdapat pelanggaran Penyelenggaraan Tramtibum di wilayah Kab/ Kota maupun wilayah perbatasan;
- Kurangnya ketrampilan PPNS dalam melakukan proses penyidikan;
- Masih belum optimalnya koordinasi dengan aparat samping dalam pengembangan kemampuan aparat satpol PP dengan Polri

Upaya Pemecahan Masalah

- Patroli wilayah pada daerah rawan gangguan Tramtibum secara rutin dan berkala;
- Peningkatan performance PPNS melalui Bimtek dan Diklat PPNS;
- Melakukan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah aliran sungai brantas dan bengawan solo;
- Meningkatkan kerjasama aparat Satpol PP dengan Polri dalam rangka pengembangan ketrampilan anggota Satpol PP

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

a) Tujuan

Mewujudkan sistem keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi seluruh warga masyarakat dari gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat

b) Sasaran

- Menurunkan angka pelanggaran Perda/hukum untuk menciptakan rasa tentram, tertib dan aman masyarakat;
- Meningkatkan upaya preventif terhadap gangguan tibumtrammis
- Mewujudkan kesadaran masyarakat yang taat dan patuh hukum.

c) Tolok Ukur dan Target Kinerja

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan sebesar Rp. 2.010.800.000,00 dengan realisasi Rp. 1.998.529.700,00 (99,39%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Program/kegiatan (Terlampir)

- Terselenggaranya apel siaga gelar pasukan dan terciptanya kesiapsiagaan Satpol PP dalam rangka menciptakan kondisi Jatim yang kondusif di 38 Kab/ Kota dan 4 Bakorwil
- Terwujudnya komunitas di masyarakat yang peduli solusi konflik dan terlaksananya PAM Swakarsa di lingkungan masyarakat sebanyak 100 orang
- Pelaksanaan Rakernis dan Lokakarya Polisi pamong Praja sebanyak 50 orang
- Pelatihan aparat Linmas dalam penanganan bencana guna membantu pemerintah dalam bidang penanganan bencana di Jawa Timur sebanyak 120 orang
- Terlaksananya Rakor hasil tindak lanjut koordinasi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan sebanyak 100 orang (2 kegiatan)
- Terlaksananya pelatihan kemampuan dalam penanggulangan bencana di Jatim sebanyak 100 orang

- Penyusunan buku AKIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, RKT/Renja, Lap Tramtibum, Himpunan data pelanggaran perda bersanksi pidana, Kebijakan PP 6/2010, Perda 8/2007 dan Pergub 72/2007, Bahan Rapat DPRD/eksekutif dan kliping berita dan publikasi dokumentasi kegiatan satpol PP

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Kurangnya analisis mendalam terhadap penempatan pegawai sesuai dengan kemampuan SDM serta volume tugas yang ada;
- Disiplin moril, motivasi, kreativitas aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja lembaga secara keseluruhan;
- Perlu eksistensinya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan penegakan Perda;
- Belum tersusunnya secara baik sebuah mekanisme operasional penertiban yang terkoordinasi dan terintegrasi antar instansi terkait, baik yang menyangkut perencanaan program dan pelaksanaannya belum terwujud dalam satu kesatuan sistem;
- Belum terintegrasinya secara optimal dalam hal mekanisme operasional penertiban di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, baik menyangkut perencanaan program, pengawasan dan pengendalian dan pemeliharaan/pembinaan hasil-hasil penertiban;
- Belum terintegrasinya sistem pelaporan kegiatan operasional di bidang tramtibum, penegakan Perda dan linmas;
- Belum tersedianya posko permanen dengan dukungan logistik yang memadai bagi personil Pol PP dan Linmas sebagai pendukung operasional kegiatan tramtib dan linmas di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Upaya Pemecahan Masalah

- Perlunya dilakukan evaluasi terhadap kuantitas dan kualitas staf yang ada yang ditindaklanjuti dengan penataan ulang terhadap penempatan para staf berdasarkan kemampuan SDM yang bersangkutan serta kebutuhan dan volume kegiatan masing-masing unit kerja ;
- Penerapan reward and punishment system dalam organisasi secara obyektif dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi dan kreativitas staf ;
- Kecerdasan intelektual, kemampuan konseptual, kemampuan teknis, kecerdasan emosional, dan dilengkapi dengan nilai-nilai spiritual perlu dimiliki setiap aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga didalam pelaksanaan penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja lebih mengedepankan pendekatan persuasif, edukatif, normative, etis dan manusiawi kepada masyarakat dari pada pendekatan kewenangan/kekuasaan, untuk mewujudkan kemampuan tersebut, maka perlu dilakukan redesign sistem, metode maupun kurikulum pelatihan dan pendidikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas ;
- Setiap pelaksanaan program haruslah dapat menciptakan nilai, manfaat bagi terwujudnya ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat ;
- Perlu dialokasikan dan didistribusikan dukungan-dukungan sumber daya yang cukup bagi keperluan tercapainya shared value tersebut melalui pelaksanaan program ;
- Perlu disusun berbagai sistem-sistem yang menopang penyampaian pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, seperti sistem informal ketenteraman dan ketertiban, sistem operasional penertiban, sistem administrasi dan dukungan logistik ;

- Perlu dibentuk sistem informasi yang terintegrasi antara Satuan Polisi Pamong Praja di tingkat provinsi dengan Satuan Polisi Pamong Praja di tingkat Kabupaten/Kota ;
- Perlu disusun berbagai pedoman-pedoman berupa petunjuk-petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan operasi penertiban dan pengelolaan kegiatan-kegiatan administrasi.

4) Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

a) Tujuan

Terselenggaranya program MPU dan pelaksanaan perjanjian kerjasama lintas batas wilayah Kab/Kota

b) Sasaran

Terlaksananya Sistem Informasi Manajemen (SIM) serta validasi data kegiatan satpol PP prov. Jatim dan satpol PP Kab/ Kota

c) Tolok Ukur dan Target Kinerja

Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebesar Rp. 255.000.000,00 dengan realisasi Rp. 252.826.650,00 (99,15%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Program/kegiatan

- Terselenggaranya Rapat Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebanyak 50 orang
- Terselenggaranya program kerja MPU

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Rekrutmen anggota Satpol PP dan Linmas belum dilaksanakan secara khusus;
- Masih kurang memadai jumlah Satpol PP, PPNS dan Linmas di Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Prosedur Tetap (Protap) belum dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur/ Bupati / Walikota ;

- Penyikapan terhadap situasi Tibumtranmas masih perlu ditingkatkan dan bersikap menunggu instruksi atau perintah ;
- Kelembagaan Satpol PP Kabupaten/Kota bervariasi serta eselonnya lebih rendah dari SKPD lainnya ;
- Pemberdayaan PPNS belum optimal oleh masing-masing SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
- PPNS dan Satpol PP belum masuk dalam jabatan fungsional yang ditetapkan oleh Menpan RI.
- Kuantitas maupun kualitas anggota Satpol PP, PPNS dan Linmas di Jawa Timur perlu ditingkatkan.

Upaya Pemecahan Masalah

- Peningkatan kualitas SDM Pol PP, Linmas dan PPNS bekerja sama dengan Badan Diklat Propinsi Jawa Timur dan Diklat Polda Jawa Timur (SPN Bangsal Mojokerto).
- Pengadaan sarana mobilitas dan komunikasi.
- Koordinasi dengan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota serta Aparat Penegak Hukum dan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas operasional.
- Konsultasi dengan Pemerintah Pusat untuk pembahasan dan pengkajian kebijakan tugas-tugas Polisi Pamong Praja dan PPNS dan peningkatan kinerja/ eselonoring lembaga Satpol PP.
- Perlu merevitalisasi peran Satpol PP agar dapat berperan sebagai fasilitator dan mitra kerja masyarakat dalam menjaga trantibum.
- Dalam penyusunan produk-produk Perda Provinsi Jawa Timur yang bersangsi pidana hendaknya Polisi Pamong Praja sebagai aparat Penegak Perda dan Peraturan Perundang-undangan lainnya dilibatkan agar tumbuh sense of belonging (rasa memiliki) dan pengertian yang benar-benar jelas tentang isi isi pasal Peraturan Daerah.

3. BIRO ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM

1) Program Penyempurnaan dan Penguatan kelembagaan Demokrasi

a) Tujuan

Untuk mewujudkan pelembagaan fungsi-fungsi dan hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga politik lainnya, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang kokoh dan optimal.

b) Sasaran

Mewujudkan pengisian jabatan dan pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta anggota/pimpinan DPRD yang memenuhi syarat ketentuan yang berlaku

c) Pagu dan Realisasi Program

Pagu Program Penyempurnaan dan Penguatan kelembagaan Demokrasi sebesar Rp. 990.000.000,00 sampai dengan sebesar Rp. 989.915.000,00 (99,99%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom).

d) Hasil Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program Peningkatan Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi pada Biro Administrasi Pemerintahan Umum berupa Rapat Koordinasi Persiapan Pemilukada tahun 2011 sebanyak 1 kali, Fasilitasi pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Daerah sebanyak 1 kali.

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan

Pada Tahun 2011 terdapat 3 Kepala Daerah yang diberhentikan sementara dari jabatan Bupati, karena tersangkut masalah hukum (korupsi) yaitu : Bupati Lumajang, Bupati Pasuruan, Bupati Jember

Upaya Pemecahan

- Telah dilaksanakan konsultasi dengan jajaran lembaga peradilan baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat kasasi dan dari ketiga Kepala Daerah dinyatakan bebas dari segala tuntutan.
- Telah ditindaklanjuti dengan merehabilitasikan yang bersangkutan, dengan mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur untuk diaktifkan kembali, dan ketiga-tiganya pada tahun 2011 telah diaktifkan kembali oleh Gubernur Jawa Timur.

4. PELAKSANAAN HARIAN BADAN NARKOTIKA

1) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba

a) Tujuan

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba sesuai dengan renstra 2009-2014 mempunyai tujuan mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif, guna meningkatkan derajat kesehatan dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

b) Sasaran

Sasaran dari Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba adalah :

- Fasilitas peningkatan kualitas hukum di bidang narkoba
- Peningkatan pendayagunaan potensi dan kemampuan masyarakat untuk turut serta mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing.
- Fasilitasi peningkatan pelayanan terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
- Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
- Pembangunan system dan model perencanaan dan pengembangan partisipasi pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba
- Penyelenggaraan kampanye dan sosialisasi anti narkoba.

c) Pagu Anggaran dan Realisasi Program

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba sebesar Rp 5.900.000.000,00 dengan realisasi Rp 5.795.501.320,00 (98,23%), secara rinci realisasi per kegiatan yang terdiri dari realisasi anggaran dan

capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada LAMPIRAN (matrik 11 kolom)

d) Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Hasil Pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Penyuluhan/sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di perguruan tinggi, SMA, SLTP dan sederajat.
- Lomba kampung bersih narkoba.
- Pelaksanaan tes urine di lapas.
- Pelaksanaan operasi/razia penyalahgunaan dan peredaran narkoba di tempat hiburan, lokalisasi, hotel dll.
- Koordinasi Dan Ungkap Kasus Dalam Rangka Penegakan Bidang Hukum.
- Implementasi terapi dan rehabilitasi narkoba berbasis masyarakat di Pondok Pesantren, Panti Rehab dan Rumah Sakit.
- Pelatihan konseling adiksi Napza bagi petugas koselor dan LSM.
- Pelaksanaan Family Support Group.
- Pendampingan dan penjangjauan korban NAPZA.
- Pengembangan system informasi melalui layanan sms center dan website P4GN di Jawa Timur.
- Kampanye anti narkoba melalui kegiatan pameran-pamera.
- Pelaksanaan sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika perlu terus dilakukan secara reguler untuk meminimalisir
- pelaksanaan sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika perlu terus dilakukan secara regular untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pencegahan harus melibatkan peran serta masyarakat.

Sasaran dari kegiatan penyuluhan berasal dari kalangan remaja (PT, SMA, SLTP dan sederajat), walaupun tidak menutup kemungkinan kondisi sekarang ini pemakai narkoba bukan dari kalangan remaja saja.

Untuk lebih mensosialisasikan bahaya narkoba ini kepada masyarakat juga dilaksanakan Lomba kampung bersih narkoba di Jawa Timur yang pelaksanaannya bekerjasama dengan BAKORWIL. Adapun sistematika pelaksanaan Lomba Kampung Bersih Narkoba sebagai berikut :

- Setiap Kabupaten/ Kota se Jawa Timur mengikutsertakan 1 (satu) Kampung yang terpilih (38 Kampung);
- Selanjutnya Kampung Bersih Narkoba yang terpilih oleh Badan Narkotika Kabupaten/ Kota diusulkan ke Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (BAKORWIL) untuk diseleksi secara administrasi mengenai Kelembagaan, Program Kerja dan Implementasi Kegiatannya;
- Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Menentukan 2 (dua) kampung Bersih Narkoba terbaik untuk diusulkan ke Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur;
- Terhadap hasil penilaian dan usulan dari Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan, Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur bersama Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan melakukan tinjau lapangan secara langsung ke peserta Kampung Bersih Narkoba yang telah terpilih dengan melakukan penilaian lapangan.

Pemenang Lomba Kampung Bersih Narkoba Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.78
Pemenang Lomba Kampung Bersih Narkoba
Tahun 2011

No.	Nama Kampung	Nilai	Klasifikasi
1.	RW 7 Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo	198	Terbaik I
2.	RT 7, RW 6 Bulaksari Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Bulaksari Kota Surabaya	178	Terbaik II

3.	Desa Tawangrejo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar	176	Terbaik III
4.	RW 6 Dusun Ngandat, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu	149	Terbaik IV
5.	RW 5 Perumahan Umum Jaya Abadi, Kelurahan Jumbatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang	105	Terbaik V

Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan dari Tahun 2010 sebesar 2.478 kasus menurun menjadi 3.039 kasus pada Tahun 2011. Sedangkan jumlah tersangka pada Tahun 2010 dari 3.231 tersangka meningkat pada Tahun 2011 menjadi 3.801 tersangka. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.79
Rekapitulasi Data Ungkap Kasus dan Tersangka Penyalahgunaan Narkoba
Tahun 2010 dan Tahun 2011

NO	KATEGORI	TAHUN 2010					TAHUN 2011				
		TW I	TW II	TW III	TW IV	JUMLAH	TW I	TW II	TW III	TW IV	JUMLAH
1	KASUS	590	583	523	782	2.478	916	736	700	687	3.039
2	TERSANGKA	771	745	689	1.026	3.231	1118	933	897	853	3.801

Sumber: Ditresnarkoba Polda Jatim

Jumlah tersangka kasus narkoba yang terjadi di Jawa Timur berdasarkan jenis kelamin mengalami peningkatan dari Tahun 2010 laki-laki 3.051 orang meningkat menjadi 3.566 orang pada Tahun 2011. Sedangkan untuk jenis kelamin tersangka perempuan dari Tahun 2010 berjumlah 180 orang meningkat menjadi 235 orang pada Tahun 2011. Tersangka penyalahgunaan narkoba dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 sebagian besar didominasi oleh laki-laki.

Tabel 4.80
Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Di Jawa Timur Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH TERSANGKA		
		Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
1	Laki-Laki	3.271	3.051	3.566
2	Perempuan	187	180	235
	Jumlah	3.458	3.231	3.801

Sumber : Polda Jawa Timur

Jumlah pengguna narkoba menurut kelompok umur semakin meningkat. Perbandingan jumlah tersangka penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur berdasarkan kelompok umur periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 dapat kita lihat secara terinci pada tabel berikut:

Tabel 4.81
Perbandingan Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Di Jawa Timur
Berdasarkan Kelompok Umur

NO	KELOMPOK UMUR	JUMLAH	
		TAHUN 2010	TAHUN 2011
1.	<14	4	5
2.	15-19	240	350
3.	20-24	646	755
4.	25-64	2.337	2.686
5.	> 65	4	5
JUMLAH		689	3.231

Sumber : Polda Jawa Timur

Tabel 4.82
Perbandingan Jumlah Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Peran Tersangka

No	Status Tersangka	Th 2010	Th.2011
1.	Penanam	- orang	4 orang
2.	Produksi	2 orang	0 orang
3.	Bandar	- orang	4 orang
4.	Pengedar	2.600 orang	3.244 orang
5.	Pemakai	629 orang	549 orang
Jumlah		689 orang	3.231 orang

Sumber: Polda Jawa Timur

Pada Tabel diatas terlihat jumlah pengedar pada tahun 2010 sebanyak 2.600 orang meningkat pada tahun 2011 menjadi 3.244 orang. Sedangkan jumlah pemakai narkoba di Jawa Timur mengalami penurunan dari

sebanyak 629 orang pada tahun 2010 menurun menjadi 549 orang pada tahun 2011. Di Jawa Timur peran tersangka sebagai pengedar lebih banyak. Dilihat dari latar belakang pendidikan jumlah pemakai narkoba dari SD,SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi dari Tahun 2010 sebesar 3.231 meningkat menjadi 3.801 pada Tahun 2011, terjadi peningkatan sebesar 570 atau 17,64% demikian pula jumlah pemakai narkoba berdasarkan pekerjaan juga mengalami peningkatan yang dari tahun 2010 sebanyak 3.231 menjadi 3.801 pada Tahun 2011, hal tersebut disebabkan karena narkoba sudah mewabah dan menjadi tren atau gaya hidup kalangan remaja.

Tabel 4.83
Jumlah Tersangka Penyalahguna Narkoba Di Jawa Timur
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Tahun 2010	Tahun 2011
	Tersangka	(Orang)	(Orang)
1.	Tidak Sekolah	33	8
2.	SD	321	534
3.	SMP	431	702
4.	SMA	1.037	1.373
5.	Perguruan Tinggi (PT)	90	127
6.	Belum Diketahui	1.319	1.057
Jumlah		3.231	3.801

Sumber: Polda Jawa Timur

Tabel 4.84
Jumlah Tersangka Lahgun Narkoba Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Tersangka	
		Tahun 2010	Tahun 2011
1.	Pelajar	54	99
2.	Mahasiswa	38	80
3.	Swasta	2.289	2.520

4.	Buruh/ karyawan	163	171
5.	Petani/ nelayan	137	143
6.	Pedagang	26	76
7.	Wiraswasta/ Pengusaha	175	226
8.	Sopir/ Tukang ojek	95	123
9	Ikut Orang Tua	-	6
9.	Ibu Rumah tangga	32	28
10.	Tidak Kerja	2	270
11.	Notaris	2	-
12.	TNI/POLRI	34	21
13.	PNS	18	30
14.	Napi	1	8
Jumlah		3.231	3.801

Sumber : Direktorat Narkoba Polda Jatim

Operasi/razia yang dilaksanakan untuk mencegah peredaran narkoba yang semakin marak di masyarakat juga dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan kinerja Pemerintah dalam mewujudkan masyarakat Jawa Timur bersih dari narkoba. Berikut ini daftar rekapitulasi jumlah kasus penyalahgunaan narkoba berdasarkan tempat kejadian perkara dan berdasarkan barang bukti yang ditemukan.

Tabel 4.85
Daftar Rekapitulasi Jumlah Kasus Lahgun Narkoba Berdasarkan
Tempat Kejadian Perkara

No	Tempat Kejadian	Jumlah kasus Tahun 2010	Jumlah kasus Tahun 2011
1.	Tempat umum	1.563	1.956
2.	Pemukiman	761	962
3.	Hotel/ Villa	85	60
4.	Ruko/ mall	33	16
5.	Rutan	11	20
6.	Terminal/ Bandara	20	20
7.	Diskotik/Karaoke	5	5
Jumlah		4.956	3.039

Sumber : Sumber :Direktorat Narkoba Polda Jatim

Tabel 4.86
Perbandingan Daftar Rekapitulasi Jumlah Laghun Narkoba
berdasarkan Barang Bukti

No	Jenis Barang Bukti	2010	2011
NARKOTIKA			
1.	Ganja	21.005,1 Gram	11.370,531 Gram
2.	Putauw	5,42 Gram	1.973,24 Gram
3.	Shabu-shabu	15.434,407 Gram	4.194,518 Gram
4.	Extasi	3.600 Butir	96.167 Butir
5.	Heroin	-	-
6.	Cocain	-	-
PSIKOTROPIKA			
7.	Golongan I	362.510 Butir	313.062 Butir
8.	Daftar G	1.416 Butir	1.544.414,916 Butir
9.	Okerbaya / biji	31.074	359.991,919 Butir

Sumber : Ditresnarkoba Polda Jatim

Kegiatan pendampingan dan penjangkauan yang dilaksanakan dalam rangka membantu korban NAPZA untuk merehabilitasi diri sangat diperlukan. Jumlah pasien terapi medis yang direhabilitasi di Rumah Sakit maupun Klinik menurut jenis kelamin, usia dan status perkawinan dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.87
Rekapitulasi Pasien Terapi Medis dan Rehabilitasi Penyalahgunaan
Narkoba Di Jawa Timur

NO	NAMA RUMAH SAKIT	JENIS KELAMIN					
		TH 2010			TH 2011		
		L	P	Jml	L	P	Jml
1	RSU.Dr.Soetomo	618	11	629	142	5	147
2	RSU.Dr.Saiful Anwar Malang	94	2	96	31	4	35
3	RSU.Dr.Sudono Madiun	-	-	-	16	0	16
4	RSJ.Dr.Radjiman Lawang	201	9	210	163	6	169
5	RSJ.Menur	183	16	199	58	2	60
6	Klinik Lapas Pamekasan	-	-	-	102	0	102

7	Klinik Lapas Madiun	-	-	-	115	0	115
8.	UPT.Rehsos ANKN Surabaya	21	0	21	84	0	84
9	LSM Yakita	182	26	208	192	49	241
10	Ponpes Inaba XIX	-	-	-	56	7	63
11	PondokDoulos Batu	-	-	-	21	1	22
Total		1,299	64	1,363	980	74	1,054

Tabel 4.88
Daftar Rekapitulasi Jumlah Korban Lahgun Narkoba Yang di Terapi
Medis dan Rehabilitasi Berdasarkan Usia
Tahun 2011

No	Instansi	Usia Korban Penyalahgunaan Narkoba					
		< 12	12- '18	19-24	25-40	>40	Tidak Diketahui
1	RSU. Dr.Soetomo	0	4	28	101	14	0
2	RSU.Dr.Saiful Anwar	0	0	13	18	4	0
3	RSU. Dr.Sudono Madiun	0	1	5	10	0	0
4	RS. Jiwa Dr.Radjiman Lawang	0	6	52	102	9	0
5	RS.Jiwa Menur	0	1	7	44	0	8
6	Klinik Lapas Pamekasan	-	1	8	84	9	0
7	Klinik Lapas Madiun	-		3	22	0	90
8	UPT Rehsos ANKN Sby	0	27	47	10	0	0
9	LSM Yakita	0	3	107	97	8	26
10	Ponpes Inabah XIX	0	14	15	30	4	
11	Pondok Doulos Batu	0	2	1	13	6	0
Jumlah		1	83	214	522	143	54

Tabel 4.89

Daftar Rekapitulasi Jumlah Korban Lahgun Narkoba Yang di Terapi Medis dan Rehabilitasi sosial di Jawa Timur Berdasarkan Jenis Napza yang Digunakan Periode Bulan Juli s/d September Th 2011

No	Instansi	Jenis Napza Yang Digunakan														
		Ganja /marijuana	Putauw Heroin	Ko kain / C r a c	Ex tasi / MDMA	Powder/Shabu	Metam pheta mine/	Metamphetamin e (Shabu tablet)	Metamphetamin e/shabu (Crystalline)	Ketamin	Barbie turat	Benzozediaphine s	Dextro Metrophom	Amphe tamine	Doublel / Trhix	ALKOHOL
1	RSU. Dr. Soetomo	131	78	18	124	66	159	94	0	32	124	61	23	48	135	0
2	RSU. Saiful Anwar	2	6	7	1	5	2	0	2	0	10	0	0	0	12	0
3	RSUDr.Soedono Madiun	0	8	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0
4	RS. Jiwa Dr.Radjiman Lawang	32	16	12	14	14	0	0	0	0	0	39	0	0	150	24
5	RS. Jiwa Menur	22	19	0	12	6	6	0	0	0	10	1	3	1	19	0
6	Klinik Lapas Pamekasan	21	20	0	20	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Klinik Lapas Madiun	3	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UPT Rehsos ANKN Srby	0	5	1		11	6	6	0	0	0	0	0	4	16	0
9	LSM Yakita	13	41	0	3	93	0	24	0	0	0	0	0	0	9	0
10	Ponpes Inaba XIX Surabaya	18	1	0	22	342	0	0	0	0	0	49	18	88	98	1
11	Pondok Doulos Batu	5	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Jumlah		247	194	38	206	614	173	124	2	32	144	150	44	142	444	30

Sumber: Laporan Layanan Terapi Medis dan Rehabilitasi Sosial di RSU

Dr.Soetomo,RSU Saiful Anwar Malang, RS Jiwa Lawang,RSJiwa Menur,RSU

Dr.Soedono, Klinik Lapas Pamekasan, UPT Rehsos Surabaya,dan LSM Ya Surabaya
 ,Serta KPA Prov Jatim , Th 2011

Tabel 4.90
Jumlah Kumulatif Korban Lahgun Narkoba Di Layanan Terapi Dan
Rehabilitasi Sosial Jawa Timur Berdasarkan Metode Terapi dan
Rehabilitasi Tahun 2011

No	Nama Instansi Terkait	Jenis Kelamin		Model Layanan Terapi Dan Rehabilitasi Sosial (Rawat							
		Laki-laki	Perempuan	Rumatan Metadon	Rumatan Supremo/ Naloksn	Cold Turkey	Support group	Terapi Community	Detoksifikasi	Detoksifikasi Tradisional	RELIGI
1	RS. Dr. Soetomo	17	0	8	0	0	0	0	9	0	0
2	RSU.Saiful Anwar Malang	12	1	13	0	0	0	0	0	0	0
3	RSU.Sudono Madiun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RSJ.Dr.Radjiman Wediodiningrat Lawang	40	2	-	5	-	-	37	-	-	-
5	RS.Jiwa Menur Surabaya	15	-	12	0	0	0	3	0	0	0
6	Klinik Lapas/Pamekasan	39	0	0	0	20	0	19	0	0	0
7	Klinik Lapas Madiun	25	0	1	0	0	0	24	0	0	0
8	UPT Rehsos ANKN Srby	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0
9	LSM Yakita	13	4	0	0	0	17	0	0	0	0
10	Ponpes Inaba XIX Sby	115	0	0	0	0	0	0	0	15	115
	Jumlah	279	7	34	5	20	17	86	9	15	115

Sumber: Laporan Layanan Terapi Medis dan Rehabilitasi Sosial di RSU

Dr.Soetomo,RSU Saiful Anwar Malang,

RS Jiwa Lawang,RSJiwa Menur,RSU Dr.Soedono, Klinik Lapas Pamekasan, UPT
 Rehsos Surabaya,dan LSM Ya Surabaya ,Serta KPA Prov Jatim ,Periode
 Triwulan III, Th 2011

Tabel 4.91
Daftar Rekapitulasi Jenis Penyakit Akibat Lahgun Narkoba
Tahun 2011.

NO	RumahSakit/ Lembaga	Riwayat /Penyakit yang menyertainya					
		HAIV / AIDS	Hepatitis B	Hepatitis C	TBC	Gangguan mental	Penyakit Lainnya (DM,Gastritis)
1	RS. Dr. Soetomo	0	8	8	0	0	1
2	RSU.Saiful Anwar Malang	7	6	0	0	0	6
3	RSU Dr.Sudono Madiun	0	0	0	0	0	0
4	RSJ.Dr.Radjiman Wediodiningrat Lawang	2	0	0	0	31	0
5	RS.Jiwa Menur	6	2	1	0	0	0
6	Klinik Lapas Pamekasan	2	5	1	0		6
7	Klinik Lapas Madiun	0	0	0	0	0	0
8	UPT Rehsos ANKN Surabaya	0	0	0	0	0	3
9	LSM Yakita	0	0	0	0	0	0
10	Ponpes Inabah XIX	0	0	0	0	0	1
	Jumlah	17	21	10	0	31	17

Sumber: Laporan Bulanan Layanan Terapi Medis dan Rehabilitasi Sosial di RSU Dr.Soetomo,RSU Saiful Anwar Malang,RS Jiwa Lawang,RSJiwa Menur,RSU Dr.Soedono, Klinik Lapas Pamekasan, UPT Rehsos Surabaya,dan LSM Yakita Surabaya ,Serta KPA Prov Jatim ,Periode Triwulan III, Th 2011

Tabel 4.92
Jumlah Kumulatif Kasus HIV dan AIDS Menurut Faktor Risiko
Tahun 2011

NO	FAKTOR RESIKO	HIV dan AIDS	%
1	Heteroseksual	2834	56.4
2	IDU	1233	24.6
3	Homoseksual	224	4.5
4	Transmisi Prenatal	122	2.4
5	Bisek	7	0.1
6	Transfusi Darah	22	0.4
7	Lain –lain	580	11.5
Jumlah		5022	100

e) Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Permasalahan

- Kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba yang masih rendah karena faktor pendidikan, ekonomi, dan sosial yang berada di bawah standart kemakmuran.
- Jumlah kasus dan tersangka penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat dari tahun ketahun seiring dengan perkembangan arus globalisasi.
- Penyuluhan/sosialisasi P4GN masih terbatas pada sasaran anak-anak sekolah dan belum tersosialisasi pada tingkat masyarakat.
- Penyelidikan penyalahgunaan NAPZA dalam rangka ungkap ksus di Jawa Timur masih belum membuahkan hasil yang optimal.
- Pendampinganterapi dan rehabilitasi hanya dilakukan sebagai fasilitator dan tidak ada program berkelanjutan dari penanganan korban NAPZA pasca terapi.

Upaya Pemecahan

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka perlu langkah/upaya upaya permasalahan antara lain melalui:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba melalui media cetak dan elektronik.
- Menekan jumlah kasus yang semakin meningkat dari tahun ketahun melalui operasi yang melibatkan Instansi terkait diantaranya kepolisian dan mengambil tindakan yang tegas untuk memberi wawasan dan pengetahuan bahaya penyalahgunaan narkoba.
- Penyuluhan dan sosialisasi dilaksanakan pada masyarakat luas untuk memberi wawasan dan pengetahuan bahaya penyalahgunaan narkoba.
- Meningkatkan koordinasi dengan kepolisian dalam rangka penyelidikan di daerah yang rawan narkoba.
- Menyediakan program yang berkelanjutan bagi korban NAPZA untuk memonitor perkembangan hasil terapi dan rehabilitasi.